

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang di dunia dengan jumlah penduduk saat ini mencapai kurang lebih 266,79 juta jiwa, data tersebut merupakan jumlah penduduk menurut perkiraan data Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam BPS (2018). Lebih sempit untuk Provinsi Jawa Barat sendiri BPS mencatat jumlah penduduk sebanyak 46,7 juta jiwa pada tahun 2015 dan secara spesifik untuk Kota Karawang BPS pada tahun 2014 mencatat sebanyak 2,2 juta jiwa penduduk dengan jumlah pencari kerja sebanyak 17.739 jiwa Annazri (2015).

Kesediaan lapangan pekerjaan di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak, salah satunya yaitu berada di Kota Karawang dimana Kota Karawang memiliki 5 kawasan industri berskala besar yang memakan 7,85% wilayah dari keseluruhan luas Kabupaten Karawang. Banyaknya perusahaan yang didirikan berdasarkan data dari BKPM Jawa Barat untuk Kabupaten Karawang sendiri berjumlah 9.963 unit dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 158.472 jiwa Annazri (2015). Banyaknya unit perusahaan dan besarnya penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan pada akhirnya berimbas pada pesatnya arus urbanisasi di Kabupaten Karawang sendiri.

Arus urbanisasi yang pesat juga pada akhirnya menimbulkan permasalahan pada masyarakat Kota Karawang, salah satunya yaitu pada penduduk yang kurang memiliki keterampilan dan pendidikan sehingga masyarakat yang masuk dalam

golongan tersebut memilih untuk bekerja seadanya bahkan tidak layak. Dalam jangka panjang, jika arus urbanisasi tidak ditangani secara tepat maka akan memunculkan efek-efek negatif seperti peningkatan pengangguran, kriminalitas, bahkan sampai pada masalah sosial yang dapat berupa penyakit masyarakat yaitu tunawisma, tunasosial dan pelacuran. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Mansur (2014) dimana terdapat dampak pencemaran sosial dan ekonomi dari pesatnya urbanisasi terhadap lingkungan, seperti masyarakat yang kurang memiliki kompetensi pada akhirnya terpaksa memilih untuk bekerja seadanya seperti menjadi pembantu rumah tangga, tukang becak, preman bayaran bahkan menjadi pekerja seks. Lebih lanjut Herlianto (Haris, 2015) menyatakan bahwa dampak negatif dari urbanisasi dapat memunculkan patologi sosial di masyarakat yang termasuk didalamnya masalah pelacuran atau prostitusi.

Pelacuran atau prostitusi merupakan kegiatan seks yang diperjual-belikan dengan imbalan berupa materi ataupun barang. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Dewi (Irwansyah, 2016) yang menyatakan bahwa pelacuran merupakan tindakan untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang bukan istri atau suami yang dilakukan di tempat-tempat tertentu, dan pada umumnya setelah melakukan hubungan seksual mereka mendapatkan imbalan berupa uang. Senada dengan hal yang telah dipaparkan diatas Kartono (2011) menyatakan bahwa prostitusi merupakan bentuk penyimpangan sosial dengan dorongan seksual yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang.

Individu yang bekerja di dunia prostitusi atau pelacuran disebut dengan pekerja seks komersial (PSK). Lebih lanjut pekerja seks komersial akan diterangkan dengan sebutan PSK. PSK merupakan suatu profesi dimana seseorang menjajakkan dirinya dalam aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan bayaran dari orang yang telah memakai jasanya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kartono (2011) dimana pekerja seks komersial (PSK) diartikan sebagai perilaku yang kurang beradab karena melakukan penyerahan diri dalam relasi seksual pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan uang dari pelayanan jasa yang ditawarkan. Stojanovic (Tiosavljevic, et al, 2016) menyatakan bahwa pekerja seks komersial merupakan seseorang yang melibatkan diri dalam prostitusi dengan memanfaatkan hubungan seksual atau tindakan lainnya kepada banyak orang demi mendapatkan keuntungan berupa uang atau hal lainnya.

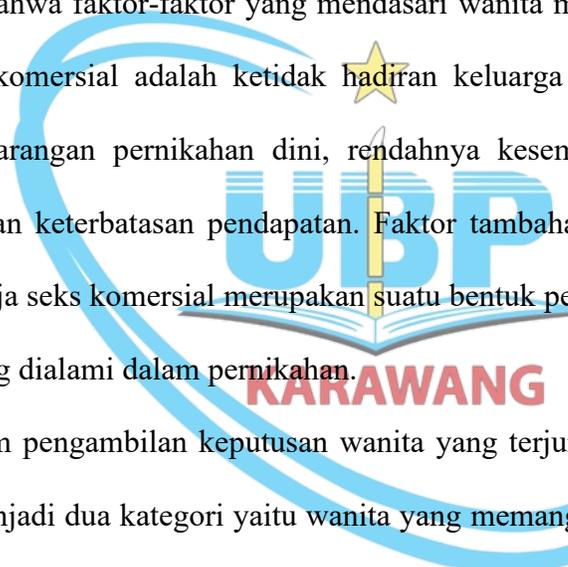
Prostitusi sendiri di Indonesia cukup besar penyebarannya hal ini senada dengan pernyataan dari perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos) yaitu Bapak Manalu dalam harian nasional (2018) dimana terdapat 168 tempat pelacuran, 120 diantaranya telah ditutup hingga Maret 2018 dan 5 tempat tutup dengan sendirinya sehingga masih terdapat 43 tempat prostitusi yang masih berjalan sampai saat ini yang terdata oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Lebih lanjut di Karawang Kota terdapat beberapa tempat yang teridentifikasi sebagai lokasi prostitusi, adapun tempat-tempat tersebut dipaparkan dalam hasil temuan dari Yudha & Ramdani (2017) yang diantaranya yaitu Seer, Kel. Nagasari, dan Kobak Biru, Telukjambe Barat.

Selain tempat-tempat prostitusi tersebut masih banyak lokasi yang sering digunakan PSK sebagai tempat menjajakkan diri seperti penginapan dan kos-kosan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kabid Pemulihan dan Perlindungan Sosial, Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang yaitu Bapak Ruchimat (Awwal, 2014) yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2013 petugas merazia 76 remaja yang sedang mesum disejumlah penginapan. Tak hanya penginapan, saat ini bisnis prostitusi juga sering dilakukan di kos-kosan, hal ini semakin menunjukkan peningkatan di wilayah Kabupaten Karawang.

Sejalan dengan temuan hasil razia yang dilakukan oleh petugas di Kabupaten Karawang, Kartono (2011) menyatakan bahwa salah satu ciri pekerja seks komersial adalah individu berusia muda dan 75% diantaranya rata-rata berusia 17-25 tahun, dimana rentan usia ini menunjukkan masa perkembangan pada tahap dewasa awal. Masa ini merupakan transisi dari remaja ke dewasa, Pada tahap ini tugas atau kriteria dewasa awal ditandai dengan mengeksplorasi diri dengan mencoba hal hal baru, mandiri secara finansial, menerima tanggungjawab akan diri sendiri, dan membuat keputusan secara mandiri Arnett (Papalia, 2014).

Menjadi PSK bukanlah keputusan yang mudah dan sederhana, banyak didalamnya terdapat hal-hal yang cukup kuat dalam melatarbelakangi para wanita untuk berprofesi sebagai PSK. Kartono (2011) menyatakan terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk menjadi PSK seperti adanya kendala dalam mencari lapangan pekerjaan, kurangnya keahlian yang dimiliki, kesulitan ekonomi, seks bebas, dan juga gaya hidup serta lingkungan sosialnya. Lebih lanjut Halawa

(Destrianti & Harnani, 2016) dalam penelitiannya mendapatkan hasil dari 124 responden bahwa terdapat faktor kebutuhan ekonomi sebesar 57,3%, pelampiasan rasa kecewa sebesar 76,6%, penipuan sebesar 54,8% , status sosial sebesar 63,7%, dan media sebesar 52,4% yang melatarbelakangi wanita memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial.

Nkhoma & Charnley (2018) dalam penelitiannya di Negara Malawi menemukan bahwa faktor-faktor yang mendasari wanita memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial adalah ketidak hadiran keluarga dalam kehidupan subjek, kemiskinan, larangan pernikahan dini, rendahnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan, dan keterbatasan pendapatan. Faktor tambahan untuk beberapa subjek, menjadi pekerja seks komersial merupakan suatu bentuk perlawanan mereka terhadap kekerasan yang dialami dalam pernikahan.

Dalam pengambilan keputusan wanita yang terjun di dunia prostitusi dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu wanita yang memang secara sukarela dan tidak sukarela. Lebih lanjut Nag (dalam Qayyum. Dkk, 2013) menyatakan bahwa wanita yang termasuk sukarela untuk berprofesi sebagai pelacur didasarkan karena faktor kemiskinan, kelaparan, krisis ekonomi, tekanan keluarga, penyakit dll. Kemudian untuk wanita yang tidak sukarela berprofesi sebagai pelacur, keputusannya diawali karena kekerasan seperti perdagangan, pemaksaan, penculikan dan ditipu. Di India, sebagian besar pelacur memang dengan sengaja memilih profesi ini dan hanya sedikit yang terjerumus karena kekerasan.

Lebih lanjut hasil temuan Wawer (dalam Saggurti. Dkk, 2013) menemukan bahwa pelacur yang memasuki dunia prostitusi secara sukarela dikarenakan faktor kemiskinan atau tekanan keluarga, sedangkan pelacur yang tidak sukarela masuk dunia prostitusi dikarenakan paksaan menjadi pekerja seks melalui perdagangan, praktek-praktek tradisional.

Dalam kaitannya memilih untuk menjadi seorang PSK, individu melewati proses yang namanya pengambilan keputusan dimana Solso (2007) menyatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan terdapat penalaran secara induktif yang dilakukan atas kendala yang dialami individu dalam kehidupannya kemudian memperhitungkan dan mengambil keputusan berdasarkan faktor-faktor yang ada dalam hal tersebut dimana dirasa sebagai pilihan terbaik dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

Nkala (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi telah memaksa banyak wanita muda melakukan pekerjaan sebagai pelacur, sulitnya mendapat pekerjaan membuat wanita memutuskan untuk menjadi pelacur agar mendapatkan penghasilan. Selain itu temuan juga mengungkapkan bahwa di Zimbabwe pendidikan terbaik hampir sulit ditemukan, runtuhnya ekonomi dan besarnya tingkat kemiskinan juga telah memicu prostitusi dikalangan mayoritas perempuan muda.

Berdasarkan dari penjelasan atas fenomena dan dukungan hasil penelitian yang telah diungkapkan tentang PSK diatas terdapat berbagai macam faktor yang melatarbelakangi wanita memilih berprofesi sebagai PSK, beberapa hal diantaranya

seperti sulitnya mendapat pekerjaan, masalah perekonomian, gaya hidup, pengaruh lingkungan sosialnya, sampai pada masalah pribadi seperti, keputusan menjadi PSK merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap kekerasan yang dialami dalam pernikahan. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Keputusan wanita untuk menjadi Pekerja Seks Komersial di Karawang Kota”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi wanita memutuskan berprofesi sebagai PSK?
2. Bagaimana bentuk keputusan yang melandasi wanita untuk menjadi PSK?
3. Bagaimana profil yang dimiliki wanita yang memutuskan untuk menjadi seorang PSK?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memahami faktor apa saja yang melatarbelakangi wanita memutuskan untuk menjadi PSK.
2. Memahami bentuk keputusan yang melandasi wanita memilih pekerjaan sebagai PSK.
3. Mendapatkan gambaran profil wanita yang memutuskan menjadi PSK.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang pengambilan keputusan. Selain itu juga dapat berguna sebagai literatur rujukan bagi peneliti selanjutnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru terkait kajian tentang ilmu Psikologi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui hasil analisa yang didapat dari pihak-pihak yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial, hasil yang didapat diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan kepada :

- a. Individu terkait informasi dan pengetahuan tentang pengambilan keputusan.
- b. Instansi terkait yang menangani penyakit sosial salah satunya prostitusi dan PSK agar dapat mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat tersebut dengan cara memberikan pembinaan dan mengembangkan keahlian yang dapat membantu PSK untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan lain yang lebih layak.